



Rancangan Akhir

RENCANA KERJA 2019

***Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Sibolga***

**Jl. Tongkol No. 12 - Sibolga
Telp. 0631 - 21799**

KATA PENGANTAR

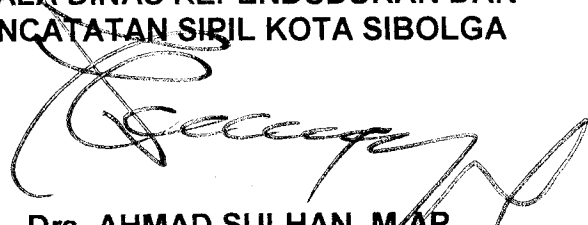
Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Sibolga, Desember 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA**



Drs. AHMAD SULHAN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650224 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra SKPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3 Isu-isu penting tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	30
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	35
BAB V. PENUTUP	36

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD.....	9
Tabel 2.2. Target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.....	14
Tabel 2.3. Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2016-2020	14
Tabel 2.4. Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2019	15
Tabel 2.4. Progres KTP-el sampai Tahun 2017.....	19
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan dan perundang-undangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, demokratis dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka kepada setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2019. Dengan demikian setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diharapkan dalam penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Sejalan dengan itu, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga melakukan penyusun Rencana Kerja Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2019 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2016-2020.

Fungsi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dimana yang menjadi tugas pokok adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2019 mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga;
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun sebelumnya serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2019.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga ke dalam suatu strategi program/kegiatan.
3. Menyusun kebijakan program/kegiatan dan indikasi kegiatan tahun 2019.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2019 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu penting tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaan Terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN PENCAPAI RATA-RATAAN RENSTRA SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga setiap tahun juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2019 meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Namun karena Renja Tahun 2019 berpedoman kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2016-2020, maka evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian rata-rataan Renstra SKPD belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2017 s/d TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program kegiatan (Renja SKPD) tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB									
1	Program Penataan Administrasi kependudukan	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan								
	1. Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan	500 exp	0	100 exp	100 exp	100%	100 exp	200 exp	40%
	2. Rasionalisasi Database Kependudukan	Persentase akurasi database kependudukan.	100 %	0	93%	93%	100%	95%	188%	37.60%
	3. Implementasi Sistem Informasi Kependudukan	Jumlah Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dalam pelayanan administrasi kependudukan.	20 unit	0	4 unit	4 unit	100%	4 unit	8 unit	40%
	4. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi kependudukan	Jumlah peralatan a. Server database b. Smartcard reader KTP-el	5 unit 34 unit	0 0	1 Unit 5 Unit	1 Unit 5 Unit	100% 100%	1 unit 0	2 Unit 5 Unit	40% 14.70%
	5. Pengadaan Mobil Unit Pelayanan Keliling	Jumlah Mobil Unit Pelayanan Keliling	1 unit	0	0	0	100%	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan kegiatan (Renja SKPD) tahun 2017	Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2016	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.	Pelatihan Petugas Pengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Aparatur Kelurahan dan Kecamatan.	Jumlah Petugas Register Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti Pelatihan. a. Register Kecamatan b. Register Kelurahan	40 org 170 org	0 0	8 org 34 org	8 org 34 org	100% 100%	8 org 34 org	16 org 68 org	40% 40%
7.	Pembekalan Administrasi Kependudukan kepada Kepala Lingkungan	Jumlah Kepala Lingkungan yang telah mengikuti pembekalan.	425 org	0	85 org	85 org	100%	85 org	170 org	40%
8.	Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah Petugas Pengelola Administrasi Kependudukan yang mengikuti Bimtek. a. Admintrator (ADB) b. Operator TPDK c. Operator Capil	4 org 8 org 4 org	0 0 0	1 org 2 org 1 org	1 org 2 org 1 org	100% 100% 100%	4 org 8 org 4 org	2 org 3 org 2 org	50% 37.50% 50%
9.	Penilaian Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan di TPDK	Jumlah petugas pelayanan TPDK yang mengikuti penilaian	40 org	0	8 org	8 org	100%	8 org	16 org	40%
10.	Perlombaan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Sibolga	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan peserta lomba a. Kecamatan b. Kelurahan	16 kec 85 kel	0 0	4 kec 17 kel	4 kec 17 kel	100% 100%	4 kec 17 kel	8 kec 34 kel	40% 40%
11.	Peningkatan pelayanan publik dalam panerbitan dokumen kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan a. Kartu Keluarga (KK) b. KTP Elektronik c. Surat Pindah (SKPWNI)	21.800 lbr 16.800 lbr 5.000 lbr	0 0 0	4.200 lbr 3.200 lbr 950 lbr	8.092 lbr 5.141 lbr 1.542 lbr	192.67% 160.65% 162.32%	4.300 lbr 3.300 lbr 1.000 lbr	12.392 lbr 8.441 lbr 2.542 lbr	56.84% 50.24% 50.84%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja SKPD) tahun 2017	Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
12.	Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan akta pencatatan sipil	Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan. a. Akta Kelahiran b. Akta Kematian c. Akta Perkawinan d. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak e. Catatan Pinggir Perubahan Nama f. Kartu Identitas Anak (KIA)	20.000 lbr 200 lbr 623 lbr 65 lbr 71 lbr 24.000 lbr	0 0 0 0 0 0	3.500 lbr 30 lbr 140 lbr 20 lbr 15 lbr 0 lbr	4.095 lbr 675 lbr 357 lbr 11 lbr 4 lbr 0 lbr	92.60% 2250% 255% 55% 26.67% 0%	4.000 lbr 40 lbr 160 lbr 25 lbr 20 lbr 7.500 lbr	8.095 lbr 715 lbr 517 lbr 26 lbr 4 lbr 7.500 lbr	40.47% 357.50% 82.98% 40% 5.63% 31.25%
13.	Penerbitan Akta Perkawinan/Buku Nikah Bersubsidi	Jumlah Akta Perkawinan/Buku Nikah Bersubsidi yang diterbitkan a. Akta Perkawinan b. Buku Nikah	750 psg 420 psg	0 0	225 psg 125 psg	217 psg 50 psg	96.44% 40%	250 psg 150 psg	467 psg 200 psg	62.27% 47.62%
14.	Penyerahan Akta Kematian serta Pemberian Santunan Sosial Kematian Pemko Sibolga	Jumlah Akta Kematian yang diserahkan	2.600 lbr	0	500 lbr	0	0%	600 lbr	600 lbr	23.08%
15.	Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis informasi kebijakan kependudukan.	Jumlah Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis a. Buku Petunjuk Teknis SIAK b. Buku Petunjuk Tatacara Pencatatan Penduduk c. Buku Petunjuk Tatacara Pencatatan Sipil d. Buku Saku Kepddkn e. Brosur f. Stiker Layanan g. Banner	250 exp 500 exp 500 exp 500 exp 10.000 lbr 5.000 lbr 75 exp	0 0 0 0 0 0 0	50 exp 100 exp 100 exp -- 2.000 lbr 1.000 lbr --	50 exp 100 exp 100 exp -- 2.000 lbr 1.000 lbr --	100% 100% 100% 0% 100% 100% 0%	50 exp 100 exp 100 exp 200 exp 2.000 lbr 1.000 lbr 25 exp	100 exp 200 exp 200 exp 200 exp 4.000 lbr 2.000 lbr 25 exp	40% 40% 40% 40% 40% 40% 33.33%

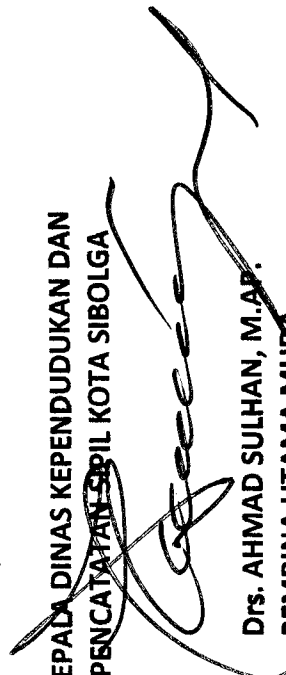
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
16.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Buku SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60 exp	0	0	20 exp	100%	20 exp	40 exp	66.67%
17.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Disdukcapil	Jumlah Buku SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 exp	0	20 exp	20 exp	100%	0	20 exp	100%
18.	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat Kota Sibolga	Jumlah Tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi	1.000 org	0	200 org	200 org	100%	200 org	400 org	40%
19.	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Kelahiran kepada Penolong kelahiran, Bidan Rumah Bersalin dan Rumah Sakit	Jumlah Penolong Kelahiran dan Bidan yang telah mengikuti sosialisasi	600 org	0	200 org	200 org	100%	200 org	400 org	66.67%
20.	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Perkawinan kepada Lembaga Agama	Jumlah Pengurus Lembaga Agama yang telah mengikuti sosialisasi	300 org	0	100 org	0	0%	0	0	0
21.	Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan	Jumlah Operasi Yustisi Kependudukan	5 kali	0	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	40%
22.	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.	Jumlah website layanan yang diupgrade	5 web	0	0	1 web	100%	1 web	2 web	66.67%
23.	Informasi Pelayanan dan Peraturan Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Informasi Pelayanan Kependudukan yang terbit di media. a. Radio b. Surat Kabar	50 kali 25 kali	0 0	10 kali 5 kali	10 kali 5 kali	100% 100%	10 kali 5 kali	20 kali 10 kali	40% 40%
24.	Penjilidan Registrasi/Akta Pencatatan Sipil	Jumlah Registrasi Akta Pencatatan Sipil yang dijiid	3.000 buku	0	600 buku	600 buku	100%	700 buku	1.300 bk	43.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017		Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	25. Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Perkawinan kepada Kecamatan/kelurahan	Jumlah Pengurus kecamatan/kelurahan yang telah mengikuti sosialisasi	940 org	0	170 org	140 org	82.35%	190 org	140 org	38.30%	
	26. Sosialisasi Pelaksanaan Penerbitan Akta Pencatatan Perkawinan/ Buku Nikah Bersubsidi kepada Kecamatan/kelurahan	Jumlah Pengurus kecamatan/kelurahan yang telah mengikuti sosialisasi	1.100 org	0	200 org	180 org	90%	220 org	400 org	36.36%	
	27. Pembangunan Sistem Registrasi dan Perekaman Registrasi pencatatan sipil	Jumlah registrasi pencatatan sipil yang terekam dalam sistem registrasi	1 paket	0	0	0	0%	1 paket	1 paket	100%	
	28. Pendokumentasi KK ke dalam Bank Data Kependudukan	Jumlah KK yang didokumentasikan	21.500 lbr	0	4.000 lbr	3.600 lbr	90%	4.300 lbr	7.900 lbr	36.74%	
	2. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah										
	1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Nilai Survey IKM	450 %	0	80 %	75%	80%	85 %	160%	35.56%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017	Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017	
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	1. Pembangunan Gedung Kantor Baru	Jumlah Gedung Kantor	1 gedung	0	1 gedung	0	0%	1 gedung	1 gedung	100%

Sibolga, Desember 2017

KEPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA


Drs. AHMAD SULHAN, M.AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650224 199303 1 001

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota, terutama yang menyangkut jenis pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Kependudukan

No	Indikator	Nilai	Waktu	Ket
1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100 %	2015	
2.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100 %	2015	
3.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	90 %	2020	
4.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	70 %	2020	

Standar Pelayanan Minimal di atas, kemudian sebagian dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2016–2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2016-2020
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Kependudukan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Capaian Renstra				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Akurasi Database	-	-	90%	93%	95%	98%	100%
2	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	-	-	85 %	90%	93 %	95%	97%
4	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akte Kelahiran	-	-	75%	80%	85%	90%	95%
5	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akte Kematian	-	-	80%	85%	90%	95%	95%
6	Cakupan Pelayanan Penerbitan Kutipan Akte Perkawinan	-	85,15%	55,40%	60.77%	70,45%	80,34 %	85,15%
7	Cakupan Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak	-	-	-	30%	35%	40%	45%

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga mengacu kepada indikator SPM dan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam koridor Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, sampai dengan Tahun 2017 dan rencana Tahun 2019 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2019
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Kependudukan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2016	Asumsi Tahun 2017	Rencana Tahun 2018	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Akurasi Database Kependudukan	89,73%	100%	90%	93%	95%	
2	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	99,24%	100%	100%	100%	100%	
3	Cakupan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	84,93%	86.81%	85 %	90%	93 %	
4	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akte Kelahiran	42,28%	44.10%	77%	80%	85%	
5	Cakupan Pelayanan Penerbitan Akte Kematian	7,65%	131,96%	75%	80%	85%	
6	Cakupan Pelayanan Penerbitan Kutipan Akte Perkawinan	48,14%	396.19%	50%	60%	70%	
7	Cakupan Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak	-	-	-	30%	35%	

Untuk pengukuran kinerja seperti yang terdapat pada Tabel 2.4 dapat diketahui secara umum terdapat peningkatan kinerja terutama dalam hal pelayanan. Persentase Akurasi Database Kependudukan telah didasarkan kepada Data Konsolidasi Bersih Ditjen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri hasil olahan per 31 Desember 2017. Database dipastikan Akurat dalam segi Data dimana setiap data yang diinput akan secara real time ter-update oleh sistem Administrasi Kependudukan, sehingga akurasi database telah dipastikan mencapai 100%. Namun ada hal yang perlu diperhatikan disini adalah walau akurasi database telah mencapai angka 100%, tapi faktualitas data dan realitas di lapangan bisa saja berbeda, diakibatkan oleh berbagai faktor. Oleh karena hal ini, maka setiap tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga terus berupaya melakukan pemuktahiran database kependudukan agar data semakin fatual sesuai kriteria di lapangan. Angka faktual penduduk kota Sibolga per Desember 2017 adalah 96.249 jiwa.

Kartu keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga di tahun 2016 telah mencapai angka 100%. Dari 23.934 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 23.934 Kartu Keluarga telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Setiap permohonan Kartu Keluarga telah dilayani seluruhnya dengan baik dan telah diterbitkan kartu keluarganya.

Penerbitan KTP-el di kota sibolga pada tahun 2017 sedikit melambat diakibatkan adanya gangguan teknis berupa kosongnya blanko KTP-el yang belum siap cetak oleh Kemendagri. Walaupun demikian Jumlah KTP-el yang telah diterbitkan sampai dengan desember 2017 sebanyak 56.978 keping dari total 65.637 jiwa wajib KTP di Kota Sibolga. Persentase penerbitan KTP-el ini telah mencapai Angka 86.81% di tahun 2017, yang mana terjadi kenaikan sebesar 1.88%.

Dari total 96.249 jiwa penduduk kota sibolga, telah diterbitkan sebanyak 42.442 lembar akta kelahiran atau sebesar 44.10%. Terjadi peningkatan jumlah penerbitan angka kelahiran sebanyak 1.82% atau terdapat kenaikan 175 lembar akta kelahiran

yang diterbitkan di tahun 2017. Seluruh permohonan penerbitan akta kelahiran telah diselesaikan untuk tahun 2017.

Di tahun 2016 terjadi kenaikan yang sangat signifikan untuk pelayanan penerbitan akta kematian. Terdapat 513 Laporan kematian yang ada di kota Sibolga pada tahun 2016, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima 677 permohonan penerbitan Akta Kematian yang keseluruhannya telah di terbitkan di tahun 2016. Dari angka tersebut, persentase pelayanan penerbitan akta kematian di kota Sibolga pada tahun 2017 mencapai 131.96%, yang mana terjadi peningkatan 124.31% dari tahun 2016.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga hanya menerbitkan Akta Perkawinan bagi penduduk non muslim. Di tahun 2016 telah diterbitkan 416 lembar akta perkawinan dari telah jumlah perkawinan sebanyak 105 peristiwa. Dari hal ini, diketahui persentase pelayanan penerbitan angka Perkawinan di tahun 2017 adalah 396.19%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar 348.05%.

Untuk pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga telah mempersiapkan sejumlah sarana dan prasarana pendukung sekaligus melatih sumber daya manusianya akan di tahun 2018 kegiatan pelayanan sosialisasi dan penerbitan Kartu Identitas Anak dapat terlaksana.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Cakupan Data Base Kependudukan

Data Kependudukan, merupakan kumpulan data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data penduduk, memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan, baik pembangunan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.

Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersimpan di dalam data base kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

Oleh karena data penduduk memiliki arti yang sangat strategis, pada tahun 2019, terus diupayakan update data bagi setiap penduduk Kota Sibolga agar tercatat dalam Database Kependudukan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas data penduduk, setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diharapkan dapat dilaporkan dan dicatat pada setiap tingkatan pemerintahan dan selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan. Dengan demikian database kependudukan akan terjaga akurasinya melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilakukan secara rutin.

2. Pengembangan Sarana Prasarana Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan. Dengan SIAK, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil akan terintegrasi secara langsung dengan data base kependudukan.

Pengkajian dan pengembangan SIAK dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau oleh Pemerintah Kabupaten/kota, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

Pada tahun 2019, peningkatan kualitas pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Kualitas Pelayanan di 4 (empat) Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) masih menjadi salah satu fokus pembangunan bidang administrasi kependudukan.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur berkualitas menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Salah satu unsur terwujudnya pelayanan yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang terampil dan profesional. Melalui berbagai bimbingan teknis, diharapkan dapat menciptakan tenaga pengelola SIAK di tingkat kelurahan, kecamatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang terampil dan berjiwa melayani. Pada setiap Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) diperlukan minimal 3 (tiga) orang petugas terampil dan profesional. 1 orang sebagai petugas registrasi dan 2 orang sebagai operator yang masing-masing bertanggungjawab atas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Penerapan KTP Elektronik

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013). Dengan demikian KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

Adapun progres perekaman data KTP Elektronik sampai dengan bulan Desember tahun 2016 adalah jumlah KTP-el telah selesai cetak 56.978 wajib KTP (86,81%) dari total wajib KTP 65.637 jiwa.

Tabel 2.5
Progres KTP Elektronik Tahun 2016

NO	KECAMATAN	KTP-el SELESAI CETAK
1	2	3
1.	SIBOLGA UTARA	13,890
2.	SIBOLGA KOTA	10,448
3.	SIBOLGA SELATAN	19,301
4.	SIBOLGA SAMBAS	13,339
JUMLAH		56,978

Pada tahun 2018, penerapan KTP elektronik akan tetap menjadi kegiatan prioritas sehingga masyarakat memahami akan manfaat dan fungsinya serta secara sadar datang ke tempat pelayanan untuk mendaftarkan diri dan mendapat pelayanan KTP elektronik. Pelayanan KTP elektronik memasuki tahap reguler, dan akan lebih diarahkan kepada penduduk wajib KTP pemula yang baru berusia 17 tahun atau telah menikah serta bagi penduduk yang belum melakukan perekaman data KTP-el. Pelayanan KTP-el secara reguler di Kota Sibolga telah dilaksanakan dari tahun 2015 meliputi personalisasi, pencetakan, verifikasi (aktivasi kartu) dan distribusi KTP-el secara berkelanjutan. Permasalahan kekurangan Blanko KTP-el masih menjadi kendala dalam memberikan pelayanan prima. Semoga di tahun 2017 permasalahan kekurangan KTP-el dapat teratasi.

5. Pencatatan Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan proses penting dalam membangun data base kependudukan yang akurat dan akta kelahiran memberikan kepastian hukum akan status seseorang di dalam keluarga.

Kesadaran masyarakat di Kota Sibolga dalam memiliki akta kelahiran sudah mulai membaik. Angka kelahiran telah menunjukkan kenaikan, walaupun tidak terlalu signifikan. Adapun jumlah akta kelahiran yang telah selesai cetak hingga bulan desember tahun 2016 adalah 28.887 lembar (84.03%) dari 34.376 jumlah anak usia di bawah 17 tahun.

Beranjak dari permasalahan tersebut, kegiatan pencatatan kelahiran menjadi prioritas yang akan ditunjang dengan berbagai kegiatan sosialisasi. Demikian juga dengan kelengkapan elemen data penduduk dalam database terkait dengan kepemilikan akta pencatatan sipil akan divalidasi dan di-input secara rutin ke dalam database melalui pelayanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa penerbitan Akta pencatatan sipil mulai tahun 2014 dilaksanakan di tempat domisili penduduk. Demikian juga halnya dengan penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya, tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, tetapi cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, bahwa untuk anak masih dalam kandungan sampai dengan anak usia 17 tahun kurang 1 hari, maka diterbitkan Kartu Identitas Anak.

6. Pencatatan kematian

Pencatatan peristiwa kematian sampai dengan akhir tahun 2016 mulai meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena belum maksimalnya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan peristiwa kematian, sehingga cakupan pelayanan pencatatan peristiwa kematian masih rendah. Pencatatan peristiwa kematian sangat berpengaruh terhadap kualitas data kependudukan. Oleh karena itu pada tahun 2017, pencatatan peristiwa kematian menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang disertai dengan pemberian bantuan sosial Pemko Sibolga.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaporan kematian antara lain melalui sosialisasi kepada petugas di kelurahan dan kecamatan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, **diubah** menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui Kepala Lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan. Di samping itu juga akan dilakukan peninjauan kerjasama (MoU) dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga bagaimana untuk mengintegrasikan pemberian santunan uang duka bagi penduduk yang meninggal dunia dengan pelaporan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

7. Kartu Identitas Anak (KIA) === Belum di revisi

Perpindahan penduduk, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Perpindahan penduduk dalam satu kelurahan.
- b. Perpindahan penduduk antar kelurahan dalam satu kecamatan.

- c. Perpindahan penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- d. Perpindahan penduduk antar kabupaten/provinsi.
- e. Perpindahan penduduk antar negara.

Setiap perpindahan penduduk, baik penduduk pindah maupun penduduk datang, harus dicatat dan dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari instansi yang berwenang. Hal ini sangat menunjang terbangunnya data base kependudukan yang akurat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2019, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimuali musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau

aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan.

Program/kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan tahun 2019, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sampai saat ini belum ada.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 merupakan implementasi dari kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota Sibolga.

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2019 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah:

1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan pada tahun 2011, sedangkan penerapan KTP elektronik telah memasuki tahap pelayanan secara reguler pada tahun 2015. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan KTP elektronik secara reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Kebijakan dalam Pencatatan Sipil, sesuai Rencana Strategis Catatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya", menggambarkan betapa pentingnya memiliki akta kelahiran. Perkembangan peraturan yang semula bagi pemohon yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun harus melalui Penetapan Pengadilan, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konsitusi bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan, bersifat tidak mengikat. Mengandung arti, bagi pemohon yang berusia lebih dari 1 (satu) tahun, tidak harus melalui Penetapan Pengadilan, akan tetapi cukup dengan Penetapan Kepala Instansi Pelaksana. Selain itu berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, untuk setiap anak yang masih dalam kandungan hingga berusia 17 tahun kurang 1 hari memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai rata-rata visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Adapun tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2016-2020 adalah **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dukungan Database yang Akurat dan Terpercaya"**.

Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran berdasarkan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Termanfaatkannya data Individu dan Data Agregat Kependudukan yang Valid dan Berkualitas.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- A. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 9. Penyediaan Jasa Non PNS

10. Penyediaan jasa lembur PNS dan Non PNS

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Mebeleur
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur

C. Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

D. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan/pelatihan dan kursus keterampilan

E. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Semesteran/Prognosis Kas
2. Penyusunan Laporan Tahunan Kas

F. Peringatan Hari-Hari Besar

1. Pameran HUT RI
2. Pameran Pembangunan Kota Sibolga

G. Penataan Administrasi Kependudukan

1. Pedoman dan Petunjuk Teknis Standard Operasi SIAK dan Administrasi Pelayanan Kependudukan Pencatatan Sipil dengan SIAK
2. Perlombaan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Sibolga

3. Pendayagunaan Informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pelatihan Petugas Pengelola Adm. Kependudukan Tingkat Kota Sibolga
4. Pendayagunaan Informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Pelatihan Petugas Pengelola Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Aparatur Kel. Dan Kec.
6. Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sibolga Tahun 2016
7. Sosialisasi Pelaksanaan Penerbitan Akta Perkawinan/ Buku Nikah Bersubsidi
8. Penerbitan Akta Perkawinan/ Buku Nikah Bersubsidi
9. Sosialisasi Administrasi Pencatatan Perkawinan kepada Masyarakat Kota Sibolga
10. Sosialisasi Administrasi Pencatatan Perkawinan kepada Lembaga Agama Kota Sibolga
11. Perekaman dan Pendistribusian KTP-el Mobile di SLTA dan Pusat Keramaian
12. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SIAK dan Pelayanan KTP-el se-Kota Sibolga
13. Razia Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
14. Pembekalan Administrasi Kependudukan kepada Kepala Lingkungan
15. Rasionalisasi Database Kependudukan
16. Integrasi Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Anak Usia 0-18 Tahun di Kota Sibolga (Non Siak)
17. Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
18. Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penolong Kelahiran, Bidan, Rumah Bersalin dan Rumah Sakit
19. Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penolong Kelahiran, Bidan, Rumah Bersalin dan Rumah Sakit

20. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kependudukan di Kota Sibolga

21. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pencatatan Sipil ke-Rumah Ibadah Kota Sibolga

H. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja Program dan masing-masing Kegiatan. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Pagu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil T.A 2017 didasarkan pada pagu APBD-P 2017 sebesar Rp.162.601.996.000,- dan Pagu Sekretariat Jenderal T.A 2018 didasarkan Pagu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Alokasi Anggaran T.A 2017 sebesar Rp.145.772.392.000,-. Dengan ditetapkannya pagu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.1.045.374.388.000,-. Kebutuhan anggaran tersebut untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan rincian kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan beserta target per indikator kinerja kegiatan sebagaimana tabel V.

BAB V PENUTUP

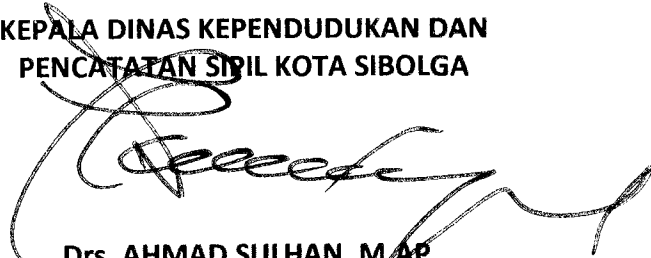
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tahun 2019 merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Tahun 2016-2020. Rencana Kerja ini disusun sedemikian rupa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sibolga untuk tahun 2019. Selanjutnya pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, dengan demikian akan diketahui indikator keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Harapan kami, dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat mempedomani Rencana Kerja yang telah disusun ini, sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kota Sibolga.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tahun 2019 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019.

Sibolga, Desember 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA**



**Drs. AHMAD SULHAN, M.AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650224 199303 1 001**

Tabel 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat kantor	SKPD	1 Tahun	10,000,000	APBD		1 Tahun	10,000,000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening : - Telepon - Air - Listrik - Pulsa SMS Gateway - Refill Air Mineral - Mekan Minum Rapat - Jaringan Internet	SKPD SKPD SKPD, TPDK SKPD SKPD, TPDK SKPD	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	3,600,000 3,000,000 78,000,000 12,000,000 11,520,000 6,000,000	APBD APBD APBD APBD APBD APBD		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	3,600,000 3,000,000 86,000,000 15,000,000 12,000,000 6,600,000
	3 Penyediaan Makan Minum Pegawai	- Refill Air Mineral - Mekan Minum Rapat	SKPD, TPDK SKPD	12 Bulan 12 Bulan	11,520,000 6,000,000	APBD APBD		12 Bulan 12 Bulan	12,000,000 6,600,000
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	SKPD, TPDK	1 Tahun	10,000,000	APBD		1 Tahun	10,000,000
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SKPD, TPDK	1 Tahun	170,000,000	APBD		1 Tahun	190,000,000
	6 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan : - Brosur - Balho - Leaflet - Kartu Identitas Anak (KIA) - Map Bid. Kependudukan - Map Khusus Capi	SKPD, TPDK SKPD, TPDK SKPD, TPDK SKPD SKPD SKPD	5,000 Lembar 20 Lembar 300 Lembar 10,000 Keping 5,000 Lembar 10,000 Lembar	17,500,000 10,000,000 7,500,000 50,000,000 25,000,000 30,000,000	APBD APBD APBD APBD APBD APBD		5,000 Lembar 20 Lembar 300 Lembar 10,000 Keping 5,000 Lembar 10,000 Lembar	19,500,000 12,000,000 9,000,000 60,000,000 30,000,000 35,000,000
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	SKPD, TPDK	1 Tahun	10,000,000	APBD		1 Tahun	12,000,000
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	SKPD, TPDK	1 Tahun	18,000,000	APBD		1 Tahun	20,000,000
	9 Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Perijinan Luar Daerah Luar Provinsi - Perijinan Luar Daerah dalam Provinsi	SKPD	1 Tahun	70,000,000	APBD		1 Tahun	80,000,000
			SKPD	1 Tahun	100,000,000	APBD		1 Tahun	110,000,000
10	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya Jasa Non PNS - THL (28 org) - Petugas Keamanan (2 Org) - Petugas Kebersihan (1 org) - Supir (2 org)	SKPD, TPDK SKPD SKPD SKPD	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	403,200,000 24,000,000 12,000,000 36,000,000	APBD APBD APBD APBD		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	450,000,000 28,000,000 15,000,000 40,000,000
Terciptanya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur									
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur									
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan - Printer Epson LQ 310 - TV 42" - AC 2 PK - AC 1 PK - Instalasi Jaringan LAN - PABX Telephone - Iris Scanner - Komputer PC - Laptop I7 - Alat Pengumuman Antrian - Mesin Fotocopy Fuji Xerox - Server DATABASE	SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD TPDK SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD	4 unit 1 unit 3 unit 4 unit 1 Paket 1 Paket 4 Unit 4 unit 2 unit 1 set 1 Unit 2 Unit	20,000,000 8,000,000 31,500,000 28,000,000 15,000,000 20,000,000 16,000,000 44,000,000 28,000,000 125,000,000 80,000,000 500,000,000	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Prov. Sumatera Utara		4 unit -- 4 unit 4 unit -- -- -- 8 unit 4 unit -- -- --	24,000,000 -- 36,000,000 32,000,000 -- -- -- 88,000,000 52,000,000 -- -- --
2	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur - Gordyn (Vertical Blend) di lantai 2 di atas Ruang Pelayanan - Partisi Dinding Lantai 2 di atas Ruang Pelayanan - Kursi Putar - Mobile File (Lemari Geser)	SKPD SKPD SKPD SKPD	1 paket 1 Paket 6 unit 2 unit	15,000,000 450,000,000 15,000,000 250,000,000	APBD APBD APBD APBD		-- -- 4 unit --	-- -- 10,000,000 --
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan - Pemeliharaan Gedung & Bangunan	SKPD, TPDK	1 Tahun	10,000,000	APBD		1 Tahun	12,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan - Service kendaraan roda empat - Service kendaraan roda dua - accessories mobil - Accu roda empat - ban roda empat - Accu roda dua - ban roda dua - BBM roda empat - pelumas roda empat - BBM roda dua - pelumas roda dua - BBM Genset - Pajak Kendaraan	SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 buah 8 buah 17 buah 34 buah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	20,000,000 10,200,000 15,000,000 1,600,000 8,000,000 3,400,000 7,718,000 24,900,000 4,320,000 49,572,000 7,140,000 4,775,000 10,000,000 40,000,000	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 buah 8 buah 17 buah 34 buah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	22,000,000 11,220,000 16,500,000 1,760,000 8,800,000 3,740,000 8,489,800 27,390,000 4,752,000 54,529,200 7,854,000 5,252,500 11,000,000 44,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan peralatan	SKPD	1 Tahun		APBD		1 Tahun	11,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terlaksananya pemeliharaan mebeleur	SKPD	1 Tahun		APBD		1 Tahun	2,500,000,000
7	Pembangunan Gedung Kantor Baru	Jumlah Gedung Kantor	Sibolga	1 Gedung	1,900,000,000	APBD		2 Lantai	--
8	Pembangunan Tahap 3 Gedung Pelayanan Disdukcapil	Jumlah Upgrade Gedung Pelayanan	Sibolga	1 Tingkat/ Lantai	200,000,000	APBD		--	--
9	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua	SKPD	6 unit	138,000,000	APBD		4 unit	92,000,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Aparatur yang berintegritas tinggi							
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas - Pakaian PDH - Pakaian Olahraga	SKPD SKPD	-- --	-- --	APBD APBD		67 stel 67 stel	22,440,000 44,880,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan berdedikasi tinggi							
1	Pendidikan/pelatihan dan kursus keterampilan	terlaksananya pendidikan dan pelatihan	SKPD	1 Tahun	130,000,000	APBD		1 Tahun	143,000,000
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Excellence Public Service	Jumlah Peserta Pelatihan	SKPD	64 Orang	146,040,000	APBD		64 Orang	160,644,000
5	Program Peningkatan Hari-Hari Besar	Terwujudnya Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar							

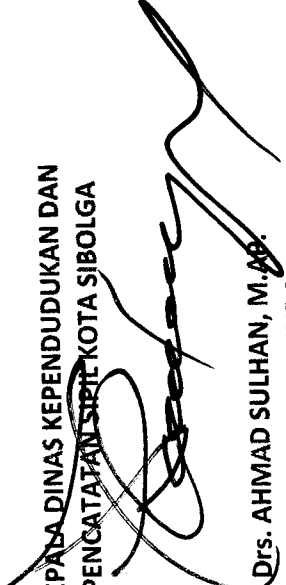
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 Pameran HUT RI	Terlaksananya Pameran	Sibolga	1 Kegiatan	2,500,000	APBD		1 Kegiatan	2,750,000
2	2 Pameran Pembangunan Sibolga	Terlaksananya Pameran	Sibolga	1 Kegiatan	41,800,000	APBD		1 Kegiatan	45,980,000
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Kota Sibolga							
1	1 Perlombaan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Sibolga	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan peserta lomba a. Kecamatan b. Kelurahan	Sibolga	4 Kecamatan 17 Kelurahan	28,120,000	APBD		4 Kecamatan 17 Kelurahan	30,932,000
2	2 Peningkatan Informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Jumlah Informasi yang disampaikan a. Sosialisasi Surat Kabar b. Balho Besar c. Banner d. Spanduk	Sibolga	12 kali 6 buah 6 buah 7 buah	12,000,000 9,000,000 1,200,000 2,700,000	APBD APBD APBD APBD		12 kali 6 buah 5 buah 7 buah	13,200,000 9,900,000 1,320,000 2,970,000
3	3 Pelatihan Petugas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Aparatur Kelurahan dan Kecamatan.	Jumlah Petugas Register Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti Pelatihan.	Sibolga	50 orang	31,810,000	APBD		50 orang	34,991,000
4	4 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sibolga Tahun 2018	Jumlah Buku Profil Kependudukan	Sibolga	75 buku	38,940,000	APBD		75 buku	42,834,000
5	5 Perekaman dan Pendistribusian KTP-el Mobile di SLTA dan Kelurahan	Terlaksananya perekaman KTP-el	Sibolga	3000 KTP	20,000,000	APBD		3000 KTP	22,000,000
6	6 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SIAK dan Pelayanan KTP-el se Kota Sibolga	Jumlah Kelurahan yang di Monitoring	Sibolga	17 Kelurahan	19,460,000	APBD		17 Kelurahan	21,406,000
7	7 Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan	Jumlah Operasi Yustisi Kependudukan	Sibolga	1 paket	18,000,000	APBD		1 paket	19,800,000
8	8 Pembekalan Administrasi Kependudukan kepada Kepala Lingkungan	Terlaksananya Pembekalan Kepala Lingkungan yang telah mengikuti pembekalan.	Sibolga	1 Kegiatan	25,550,000	APBD		1 Kegiatan	28,105,000
9	9 Pemuktahiran kepemilikan dokumen kependudukan pada Database Kependudukan	Persentase akurasi database kependudukan.	Sibolga	5,000 Kepala Keluarga	33,260,000	APBD		5,000 Kepala Keluarga	36,586,000
10	10 Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kependudukan di Kota Sibolga	Jumlah Kelurahan yang di Monitoring	Sibolga	1 paket	53,970,000	APBD		1 paket	59,367,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11 Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pencatatan Sipil ke Rumah Ibadah Kota Sibolga	Jumlah Rumah Ibadah yang di Monitoring	Sibolga	1 paket	15,875,000	APBD		1 paket	17,462,500
	12 Pengadaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIA)	Jumlah Sistem yang dikelola	Sibolga	1 Sistem	9,800,000	APBD		1 Sistem	10,780,000
	13 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	Sibolga / luar Sibolga	1 paket	49,000,000	APBD		1 paket	53,900,000
	14 Pelayanan dan Penerbitan Mobile KIA ke Sekolah-Sekolah	Jumlah Sekolah yang dikunjungi	Sibolga	3000 KIA	19,080,000	APBD		3000 KIA	20,988,000
	15 Penuktahiran kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil pada Database Kependudukan	Persentase akurasi database kependudukan.	Sibolga	600 Akta	51,800,000	APBD		600 Akta	56,980,000
	16 Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan. a. Akta Kelahiran Umum b. Akta Kelahiran terlambat c. Akta Kematian d. Akta Perkawinan e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak f. Catatan Pinggir Perubahan Nama g. Buku Register h. Kartu Keluarga (KK) i. Surat Pindah (SKPWNI)	Sibolga	2,100 lembar 1,800 lembar 600 lembar 425 lembar 10 lembar 10 lembar 500 Buah 4,400 lembar 1,100 lembar 60 orang	699,000,000	DAK		2,200 lembar 1,500 lembar 500 lembar 400 lembar 10 lembar 10 lembar 500 Buah 4,500 lembar 1,000 lembar 60 Orang	768,900,000
	17 Sosialisasi Pendataan Data Penduduk Non Permanen di Kota Sibolga Sesuai dengan Permendagri No. 14 Tahun 2015	Terlaksananya pemahaman tentang data Penduduk non permanen	Sibolga	60 orang	33,685,000	APBD			37,053,500
	18 Pendataan Penduduk non Permanen sesuai dengan Permendagri no 14 Tahun 2015	Persentase Data Penduduk Non Permanen	Sibolga	30 %	19,000,000	APBD		35 %	20,900,000
	19 Pengarsipan data Pencatatan Sipil secara Elektronik	Terlaksananya Pengarsipan data pencatatan Sipil secara Elektronik	Sibolga	10,000 Akta	27,950,000	APBD		10,000 Akta	42,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (out put)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20 Pelayanan Administrasi Akta Kelahiran Mobile	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Akta Kelahiran Mobile	Sibolga	200 Akta	17,480,000	APBD		220 Akta	47,000,000
	21 Penjilidan dan Penataan Arsip Pencatatan Sipil	Tertindakannya Penjilidan	Sibolga	100 Buku Arsip	60,000,000	APBD		100 Buku Arsip	65,000,000
	22 Perancangan Website Disdukcapil Kota Sibolga	Tersedianya Website	Sibolga	1 Website	17,000,000	APBD		--	--
	23 Sosialisasi Pelaksanaan Penerbitan Akta Pencatatan Perkawinan/Buku Nikah Bersubsidi kepada seluruh elemen masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	Sibolga	1 Kegiatan	44,210,000	APBD		1 Kegiatan	48,631,000
	24 Penerbitan Akta Perkawinan/Buku Nikah Bersubsidi	Jumlah Akta Perkawinan/Buku Nikah Bersubsidi yang diterbitkan - Akta Perkawinan - Buku Nikah	Sibolga	225 psg 100 psg	186,500,000	APBD		245 psg 110 psg	205,150,000.0
	7 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang Berkualitas dan Profesional							
	1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Nilai Survey IKM	Sibolga	87 %	3,200,000	APBD		89 %	3300000

Sibolga, Mei 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA


Drs. AHMAD SULHAN, M.A.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650224 199303 1 001